



Analisa Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026

Lusi Dewiana

Perencana Ahli Muda Pada Bappeda Kabupaten Pasaman

ABSTRACT

The results of the calculation of the LQ of the three basic sectors show a stable value from 2016 to 2020, where the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector is stable above 2 (two), the Water Supply Sector, Waste Management, Waste and Recycling and the Government Administration Sector, Defense and Mandatory Social Security are stable above number 1 (one) The three basic sectors obtained are relevant to the mission of the Regional Head, namely the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector which is relevant to mission 5 "Realizing a People's Economy Based on Local Excellence", the Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling Sector is relevant to mission 4 "Improving Infrastructure Capacity " and the Mandatory Government Administration, Defense and Social Security Sector relevant to mission 6 "Realizing Good and Clean Governance". This shows that the development of the basic sector will be interrelated with the achievement of the RPJMD mission. So with a focus on developing the three basic sectors, it will support the achievement of missions 4, 5 and 6 of Pasaman Regency.

Kata Kunci

Analysis of Regional Economic, Potential, Framework, Formulating

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU 25 Tahun 2004). Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap segala sesuatu perubahan baik internal maupun eksternal. Perkiraan tersebut antara lain menghitung potensi, prospek perkembangan dan memperkirakan hambatan-hambatan serta resiko-resiko yang akan dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Perencanaan yang baik akan menjadi basis dalam membuat program dan kegiatan oleh dinas teknis, yang kemudian harus diimplementasikan dalam sector rill (Syamsurijal,Tan 2010). Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengacu pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN). Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan tersebut mempunyai keterkaitan yaitu RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD.

Dokumen perencanaan 20 tahunan Kabupaten Pasaman yang berlaku saat ini adalah RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 dan dokumen perencanaan 5 tahunan yang berlaku sampai Tahun 2021 adalah RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. RPJMD yang berlaku saat ini merupakan pelaksanaan periode ketiga dari RPJPD Tahun 2005-2025, dan selanjutnya dengan dilantikannya kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 maka Tahun 2021 dilakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dan selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya.

Periodesasi RPJMD ini sesuai Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa periodesasi RPJMD adalah berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat. Masa jabatan dimaksud disini adalah sesuai dengan amanat pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan masa menjabat adalah sesuai dengan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dengan Visi Kepala Daerah terpilih “Mewujudkan Masyarakat Pasaman Yang Lebih Baik dan Bermartabat” yang akan diwujudkan melalui enam (6) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Serta Memperkuat Peran Lembaga Adat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar
4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur
5. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Selanjutnya keenam misi tersebut akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang tepat dan terarah untuk mencapai keenam misi tersebut selama periode 5 tahun RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan yang tepat dan terarah akan dapat memberikan peluang yang lebih besar terhadap keberhasilan pembangunan dan sebaliknya strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan secara umum tidak akan mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu selain memperhatikan visi dan misi maka kebijakan pembangunan harus dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan kedepan. Dilihat dari kondisi existing, Kabupaten Pasaman memiliki potensi yang beragam meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perairan dan sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunan dalam pengembangan potensi ini tentunya harus melalui kajian terhadap sektor mana yang akan menjadi unggulan untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah maka dilakukan analisa potensi daerah Kabupaten Pasaman dengan menggunakan metode Metode Location Question (LQ), karena metode ini merupakan salah satu metoda yang bisa digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan yang terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, arah kebijakan pada makalah ini juga akan dirumuskan dengan melihat permasalahan pokok berdasarkan sektor basis tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Location Question (LQ) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan komoditas unggulan pada suatu daerah. LQ merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Sama halnya dengan teknik analisis lain yang menggunakan data sekunder, teknik LQ mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah dapat digunakan secara sederhana dan mudah serta tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Keterbatasannya adalah pada keakuratan hasil perhitungan, jika data sekunder yang digunakan kurang terinci maka kemungkinan hasil perhitungan akan kurang tepat. Selain itu untuk memastikan hasil perhitungan LQ dapat diteliti lebih lanjut dengan melakukan studi lapangan menggunakan data primer.

Secara teoritis LQ pada dasarnya merupakan ukuran dari revealed comparative advantage yang lazim muncul dalam ilmu ekonomi regional dan perdagangan internasional. Metode Location Quotient (LQ) ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{P_i/P_t}{V_i/V_t}$$

dimana:

LQ : Location Quotient

P_i : Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah (Kabupaten Pasaman)

P_t : Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah (Total PDRB Kabupaten Pasaman)

V_i : Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas (Provinsi Sumatera Barat)

V_t : Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas (Total PDRB Provinsi Sumatera Barat)

Indikator / pengambilan keputusan :

LQ > 1 : menunjukkan terdapat konsentrasi relatif disuatu wilayah dibandingkan dengan keseluruhan wilayah. Hal ini berarti komoditas i disuatu wilayah merupakan sektor basis yang berarti komoditas i di wilayah itu memiliki keunggulan komparatif

LQ = 1 : merupakan sektor non basis, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki keunggulan komparatif. produksi

komoditas yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam wilayah itu

$LQ < 1$: merupakan sektor non basis, artinya komoditas i disuatu wilayah tidak memiliki keunggulan komparatif, produksi komoditas i di wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan harus mendapat pasokan dari luar wilayah. Komoditas yang menghasilkan nilai $LQ > 1$ merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Dan jika banyak komoditas yang menghasilkan nilai $LQ > 1$ maka derajat keunggulan komparatif ditentukan berdasarkan nilai LQ yang lebih tinggi di suatu wilayah, karena makin tinggi nilai LQ maka menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman dan Provinsi Sumatera Barat dapat dicari keunggulan kompetitif Kabupaten Pasaman terhadap Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode LQ . Analisa LQ akan menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Pasaman. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB Harga Konstan dan series data yang digunakan harus sama. Data PDRB yang digunakan bersumber dari PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 s/d 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan data PDRB Provinsi Sumatera Barat bersumber dari PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistis Provinsi Sumatera Barat.

Berikut adalah data PDRB Kabupaten Pasaman dan PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Pasaman Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020
(dalam juta rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,682,580.42	2,789,196.88	2,888,474.42	2,970,358.26	2,972,697.22
2	Pertambangan dan Penggalian	105,790.56	108,731.55	114,157.23	119,899.23	114,590.56
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	262,947.58	268,911.40	270,507.59	271,033.06	259,074.63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	901.17	937.25	975.26	997.79	934.42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	5,654.13	5,878.99	6,133.04	6,390.56	6,430.19

	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	239,705.49	260,431.83	280,025.85	301,240.81	280,547.97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	704,419.70	750,969.04	808,118.38	871,959.16	865,875.93
8	Transportasi dan Pergudangan	241,057.36	259,409.92	277,977.38	300,891.55	270,994.57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,297.82	44,621.17	48,121.25	51,797.50	46,076.76
10	Informasi dan Komunikasi	269,934.62	294,929.88	321,584.99	353,083.09	377,850.46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	132,272.33	134,979.85	135,757.86	139,009.92	139,101.54
12	Real Estat	72,652.78	76,027.44	79,782.82	83,802.00	83,820.17
13	Jasa Perusahaan	2,817.62	2,964.42	3,122.75	3,289.83	3,183.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,553.96	387,269.65	411,450.57	435,309.62	426,970.09
15	Jasa Pendidikan	114,913.97	126,311.98	135,617.70	146,392.30	153,527.36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,359.00	53,673.66	58,279.99	62,789.50	67,270.08
17	Jasa lainnya	45,045.15	49,039.75	53,253.13	58,084.00	53,811.52
Produk Domestik Regional Bruto		5,342,903.64	5,614,284.67	5,893,340.23	6,176,328.21	6,122,756.76

Sumber :PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Tabel 2.
PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020
(dalam juta rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,222,561.72	35,394,694.21	36,639,598.72	37,557,644.51	38,004,669.21
2	Pertambangan dan Penggalian	6,267,606.76	6,338,267.17	6,705,049.43	7,121,860.25	7,028,907.62
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	16,174,096.85	16,540,818.12	16,444,840.00	16,118,677.87	16,031,856.17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	161,628.93	168,196.62	175,079.95	182,441.03	170,025.43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	150,771.11	156,736.19	160,240.92	170,012.80	167,838.58
6	Konstruksi	13,126,836.91	14,075,895.58	15,061,089.08	16,336,311.64	15,858,627.53

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,796,932.47	24,279,260.45	25,976,541.84	27,869,924.72	27,552,851.94
8	Transportasi dan Pergudangan	17,506,914.87	18,762,202.18	19,969,549.69	20,918,710.72	17,551,348.06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,557,102.43	1,693,494.32	1,832,878.56	1,981,559.38	1,665,504.50
10	Informasi dan Komunikasi	9,934,334.82	10,802,637.25	11,723,224.81	12,746,455.37	13,990,227.15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,524,388.29	4,619,805.20	4,665,415.80	4,772,024.52	4,836,004.22
12	Real Estat	2,895,556.33	3,025,615.61	3,166,853.19	3,381,414.79	3,388,828.92
13	Jasa Perusahaan	651,284.00	685,063.40	722,425.15	767,245.89	736,705.29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,286,949.05	8,659,075.43	9,175,850.47	9,814,875.90	9,747,275.93
15	Jasa Pendidikan	5,416,448.83	5,954,627.35	6,382,703.06	6,889,400.02	7,235,888.67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,984,293.52	2,154,588.55	2,311,450.41	2,485,722.57	2,705,243.08
17	Jasa lainnya	2,476,536.98	2,673,386.50	2,883,397.98	3,099,509.41	2,786,312.02
Produk Domestik Regional Bruto		148,134,243.87	155,984,364.13	163,996,189.06	172,213,791.39	169,458,114.32

Sumber : PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman dan PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan rumus $LQ = \frac{Pi/Pt}{vi/VT}$ didapatkan LQ Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

Tabel 3.
Location Question Kabupaten Pasaman Tahun 2016 s/d 2020

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.17	2.19	2.19	2.21	2.16
2	Pertambangan dan Penggalian	0.47	0.48	0.47	0.47	0.45
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0.45	0.45	0.46	0.47	0.45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1.04	1.04	1.07	1.05	1.06

	dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	0.51	0.51	0.52	0.51	0.49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87
8	Transportasi dan Pergudangan	0.38	0.38	0.39	0.40	0.43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.74	0.73	0.73	0.73	0.77
10	Informasi dan Komunikasi	0.75	0.76	0.76	0.77	0.75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80
12	Real Estat	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68
13	Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.24	1.24	1.25	1.24	1.21
15	Jasa Pendidikan	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.70	0.69	0.70	0.70	0.69
17	Jasa lainnya	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53

Sumber : Data diolah

Dari hasil perhitungan dengan metode LQ didapatkan data bahwa selama lima tahun terakhir dari 17 sektor lapangan usaha Kabupaten Pasaman terdapat 3 sektor dengan nilai LQ > 1 dan 14 sektor dengan nilai LQ < 1. Ini menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor basis dan 14 sektor non basis di Kabupaten Pasaman. Tiga sektor basis tersebut yaitu :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Hasil perhitungan LQ periode 2016 sampai dengan 2020 memperlihatkan nilai LQ berfluktuasi dan cenderung turun pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :

- Pada tahun 2016, LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 2,17 dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 2,682,580.42 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 50,21% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 2,96%.
- Pada tahun 2017 LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 2,19 dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 2,789,196.88 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 49,68% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 3,97%.
- Pada tahun 2018 LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 2,19 dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 2,888,474.42 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 49,01% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 3,56%.

➤ Pada tahun 2019 LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 2,21 dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 2,970,358.26 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 48,09% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 2,83%.

➤ Pada tahun 2020 LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 2,16 dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 2,972,697.22 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 48,55% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 0,08%.

Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meningkat sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,16 (turun 0,05 poin dari tahun 2019).

2. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Hasil perhitungan LQ periode 2016 sampai dengan 2020 memperlihatkan nilai LQ berfluktuasi dan cenderung naik pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :

➤ Pada tahun 2016, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah 1,04 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 5,654.13 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,11% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 6,08%.

➤ Pada tahun 2017, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah 1,04 atau sama dengan tahun sebelumnya, dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 5,878.99 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 3,98%.

➤ Pada tahun 2018, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah 1,07 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 6,133.04 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,32%.

➤ Pada tahun 2019, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah 1,05 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 6,390.56 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,20%.

➤ Pada tahun 2020, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah 1,06 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 6,430.19 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,11% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 0,62%.

Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang meningkat sampai dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020. Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pasaman,

sektor ini memberikan kontribusi yang relatif kecil namun sektor ini merupakan salah satu dari 7 sektor yang mampu bertahan dengan pertumbuhan yang positif pada tahun 2020. Artinya dengan $LQ > 1$ dan pertumbuhan yang positif pasca covid 19 memperlihatkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis yang harus diperhatikan pengembangannya di Kabupaten Pasaman.

3. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Hasil perhitungan LQ periode 2016 sampai dengan 2020 memperlihatkan nilai LQ berfluktuasi dan cenderung turun pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :

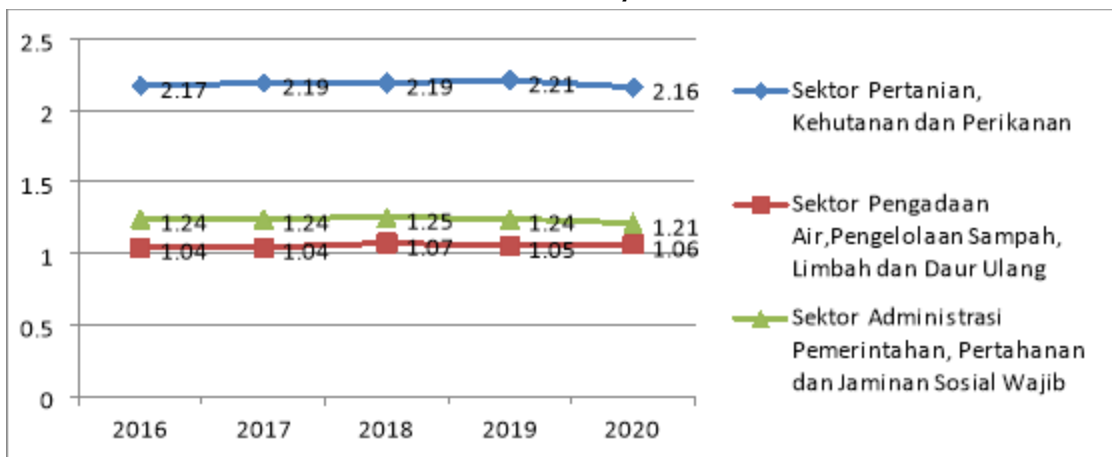
- Pada tahun 2016, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah 1,24 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 370,553.96 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 6,94% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 5,44%.
- Pada tahun 2017, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah 1,24 atau sama dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 387,269.65 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 6,90% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,51%.
- Pada tahun 2018, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah 1,25 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 411,450.57 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 6,98% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 6,24%.
- Pada tahun 2019, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah 1,24 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan sebesar 435,309.62 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 7,05% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 5,80%.
- Pada tahun 2020, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah 1,21 dengan dengan jumlah PDRB harga konstan 426,970.09 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 6,97% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini -1,92%.

Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tetap pada tahun 2016 dan 2017, mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020. Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pasaman, sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar namun laju pertumbuhan sektor ini mengalami kontraksi 1,92% pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga sektor yang dianggap basis di Kabupaten Pasaman, memperlihatkan LQ yang berfluktuasi dimana LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Sementara itu LQ Sektor

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dan turun sampai tahun 2020, kecuali untuk Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang naik lagi pada tahun 2020. Berfluktuasinya LQ ketiga sektor tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan penurunan LQ tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi covid 19 yang menyebabkan melambatnya pergerakan perekonomian seluruh dunia termasuk kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya perkembangan LQ ketiga sektor basis tersebut selama tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 1
Perkembangan Location Quotien (LQ) Sektor Basis Kabupaten Pasaman
Tahun 2016 s/d 2020



Dari grafik diatas terlihat bahwa perkembangan LQ ketiga sektor basis di Kabupaten Pasaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang stabil, dimana Sektor LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan stabil diatas angka 2 (dua) dan merupakan LQ tertinggi dari 17 sektor lapangan usaha pembentuk PDRB, LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib stabil diatas angka 1 (satu) selama 5 tahun terakhir. Kestabilan nilai LQ selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor basis ini layak untuk dikembangkan dan diperhatikan pertumbuhannya di Kabupaten Pasaman.

KESIMPULAN

1. Metode LQ dapat digunakan untuk menentukan sektor basis suatu daerah dengan menggunakan data PDRB wilayah yang lebih rendah dengan data PDRB wilayah diatasnya.
2. Berdasarkan perhitungan LQ terhadap data PDRB Kabupaten Pasaman dan Provinsi Sumatera Barat, dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Pasaman tahun

2016 s/d 2020 terdapat 3 lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Pasaman yaitu :

- a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - b. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - c. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3. Hasil perhitungan LQ ketiga sektor basis tersebut memperlihatkan nilai yang stabil dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dimana Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan stabil diatas 2 (dua), Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib stabil diatas angka 1 (satu)

Ketiga sektor basis yang diperoleh relevan dengan misi Kepala Daerah yaitu Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan relevan dengan misi 5 "Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal", Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang relevan dengan misi 4 "Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur" dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib relevan dengan misi 6 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Ini memperlihatkan bahwa pengembangan sektor basis akan saling terkait dengan pencapaian misi RPJMD. Sehingga dengan fokus pada pengembangan ketiga sektor basis tersebut akan mendukung pencapaian misi 4, 5 dan 6 Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil Analisa Location Quotion (LQ) dan permasalahan pokok serta capaian ketiga sektor tersebut direkomendasikan kebijakan untuk masing-masing sektor sebagai berikut :

- a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2020 sektor ini menjadi tumpuan 57,16% masyarakat Kabupaten Pasaman, dan sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman. Namun sektor ini belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu agar sektor basis ini dapat dikembangkan direkomendasikan kebijakan sebagai berikut

1. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan produktifitas hasil pertanian
2. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan
3. Meningkatkan hilirisasi produk pertanian, kehutanan dan perikanan
Produksi yang meningkat harus diiringi dengan hilirisasi supaya terjadi peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan. Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi koperasi dan UMKM dalam meningkatkan fasilitasi hilirisasi produk pertanian, kehutanan dan perikanan.
4. Meningkatkan peranan ASN dalam perekonomian Kabupaten Pasaman

Pemerintah diharapkan dapat mengatur partisipasi PNS di Kabupaten Pasaman dalam memanfaatkan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan melalui sebuah Peraturan Kepala Daerah dan sejenisnya, karena PNS dapat dijadikan sebagai konsumen tetap untuk setiap produk yang dihasilkan. Konsumen tetap akan menjadi salah satu pasar bagi produk yang dihasilkan.

b. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori sektor ini adalah mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Berdasarkan hasil laporan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026, hanya 20,90% rumah tangga di Kabupaten Pasaman memanfaatkan air ledeng sebagai sumber air minum utama dan terdapat 21.294 ton/tahun sampah yang tidak terkelola dengan baik dari 49.806 ton/tahun timbunan sampah setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan sektor basis dan permasalahan ini direkomendasikan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
2. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui budidaya Maggot dan meningkatkan implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

c. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Mengacu pada PDRB Kabupaten Pasaman Tahun 2016 s/d 2020, Sektor ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, oleh karena itu dengan melihat situasi dan kondisi perkembangan serta capaian pemerintahan saat ini direkomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Akuntabilitas kinerja pemerintah diukur melalui Prediket Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Semakin bagus kinerja pemerintah maka akan semakin bagus prediket SAKIP yang diperoleh yaitu dengan nilai sempurna AA. Saat ini Kabupaten Pasaman masih berada pada prediket B dengan nilai 61,38, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan upaya maksimal pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan keterlibatan pimpinan organisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2020 pelayanan publik di Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh 15

OPD dengan nilai IKM Baik. Pengukuran IKM masih dilakukan secara mandiri dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. Hasil perhitungan mandiri oleh Unit Pelayanan Publik dikhawatirkan menjadi bias dan tidak valid, oleh karena itu direkomendasi kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik agar melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau unit independen yang sudah berpengalaman dalam menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS).2021. PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.
- Badan Pusat Statistik.2021. Kabupaten Pasaman dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.
- Badan Pusat Statistik. 2021. PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Sjafrizal, 2014, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tan, Syamsurijal, 2010, Perencanaan Pembangunan: Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah, Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta 2014
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta 2004.